DIY Perpanjang Tanggap Darurat COVID-19 Sampai 31 Desember

YOGYAKARTA - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X kembali memperpanjang status tanggap darurat bencana wabah COVID-19 di provinsi itu yang berlaku hingga 31 Desember 2020.

Perpanjangan status tersebut diputuskan melalui SK Gubernur Nomor 358/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Ketujuh Status Tanggap Darurat Bencana COVID-19 DIY.

"Karena (kasus penularan COVID-19) naik dan fluktuatif. Kita tidak tahu persis kapan selesainya," kata Sri Sultan di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (30/11).

Menurut Sultan, selama jumlah kasus positif COVID-19 di DIY masih terus mengalami kenaikan, status tanggap darurat di wilayahnya akan terus diperpanjang. "Selama itu fluktiatif dan naik seperti ini, pasti diperpanjang," kata Raja Keraton Yogyakarta ini.

Status tanggap darurat bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diperpanjang mulai 1 Desember sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

FOTO ANTARA/Luqman Hakim

Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X.

Melalui keputusan itu pula, Sultan menugaskan Wakil Gubernur DIY untuk mengambil langkah dan tindakan yang diperlukan untuk mencegah dan menangani dampak buruk yang ditimbulkan wabah itu. "Antara lain meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi, isolasi, perlindungan, pengurusan, penyelamatan, serta pemulihan korban Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di DIY," kata dia.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan COVID-19 Berty Murtiningsih mencatat jumlah pasien sembuh dari COVID-19 di daerah itu pada Minggu (29/11) bertambah 139 sehingga total menjadi 5.922 kasus. Sedangkan pasien yang sembuh bertambah 50 tambahan pasien sembuh, sehingga total jumlah kasus sembuh COVID-19 di DIY menjadi 4.333 kasus. Total sampel yang diperiksa di DIY hingga 29 November 2020 mencapai 111.364 sampel dari total orang yang diperiksa 93.950 orang. **(ANTARA)**

Presiden Jokowi Peringatkan Peningkatan COVID-19 di Jakarta dan Jateng

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memperingatkan dua provinsi yang mengalami peningkatan drastis kasus positif COVID-19 yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta.

ANTARA/BPMI Setpres/Kris/pri

Presiden Joko Widodo.

"Saya ingin ingatkan bahwa ada dua provinsi yang menurut saya perlu perhatian khusus karena peningkatan dalam minggu ini, dalam 2-3 hari ini peningkatannya sangat drastis sekali yaitu Jawa Tengah dan DKI Jakarta," kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Senin (30/11).

Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam rapat terbatas dengan topik "Laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional" yang diikuti para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Presiden juga meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah untuk melindungi keselamatan warganya. "Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis, hati-hati. Berdasarkan data yang saya terima 29 November, kasus aktif kita saat ini meningkat menjadi 13,41 persen meskipun ini lebih baik dibanding angka rata-rata dunia tapi hati-hati karena ini lebih tinggi dibanding angka rata-rata minggu yang lalu," tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, angka kasus aktif COVID-19 pada pekan lalu masih 12,78 persen tapi pekan ini menjadi 13,41 persen. "Tingkat kesembuhan juga sama minggu yang lalu 84,03 (persen) sekarang menjadi 83,44 persen. Ini memburuk semuanya karena adanya tadi kasus yang meningkat dibanding minggu-minggu kemarin," ungkap Presiden.

Hingga Minggu (29/11) jumlah terkonfirmasi COVID-19 di Indonesia mencapai 534.266 orang dengan penambahan hari tersebut mencapai rekor terbanyak sejak COVID-19 terdeteksi di Indonesia yaitu sebesar 6.267 kasus. Terdapat 445.793 orang dinyatakan sembuh dan 16.815 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien suspek mencapai 70.792 orang.

DKI Jakarta masih menjadi provinsi terbanyak kasus COVID-19 positif yaitu mencapai 135.762 kasus dengan penambahan per Minggu (29/11) adalah 1.431 kasus. Provinsi selanjutnya dengan positif terbanyak adalah Jawa Timur dengan 61.483 kasus, Jawa Tengah 54.997 kasus, Jawa Barat dengan 51.776 kasus dan Sulawesi Selatan 20.552 kasus. Penambahan kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah pada Minggu (29/11) bahkan lebih besar dibanding penambahan kasus di DKI Jakarta yaitu sebanyak 2.036 kasus. **(ANTARA)**

Bupati Purbalingga Minta Program 3T Diintensifkan

PURBALINGGA - Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Purbalingga Sarwa Pramana meminta program 3T, yakni pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing) dan pengobatan (treatment) terus diintensifkan menyusul penambahan kasus COVID-19 dalam beberapa hari terakhir.

"Pelaksanaan 3T harus diintensifkan mengingat jumlah kasus COVID-19 di Purbalingga sudah mencapai lebih dari 1.000 kasus," katanya di Purbalingga, Jawa Tengah, Senin (29/11).

Dia menjelaskan pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi terkait penambahan kasus COVID-19 di wilayah setempat. "Dari rapat tersebut diketahui bahwa pemberlakuan jam malam tidak akan dilakukan, namun pelaksanaan 3T dan sosialisasi protokol kesehatan akan makin diintensifkan lagi," katanya.

Dia berharap dengan pelaksanaan 3T yang makin intensif dan dengan penerapan protokol kesehatan yang terus diperkuat maka penyebaran COVID-19 di wilayah itu akan dapat ditekan. "Jadikan protokol kesehatan sebagai kebutuhan, sebagai gaya hidup, agar kita semua dapat terlindung dari kemungkinan paparan COVID-19," katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Purbalingga Hanung Wikantono menambahkan jumlah pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di wilayah setempat sudah sebanyak 1.207 orang setelah ada tambahan 241 orang dalam empat hari terakhir.

Dia juga menjelaskan dari 1.207 orang yang terkonfirmasi positif, 415 di antaranya telah sembuh dan diperbolehkan pulang ke rumah masing-masing, 39 orang meninggal dunia dan 753 orang lainnya masih dirawat intensif di fasilitas kesehatan yang ada di wilayah ini.

Selain itu dia mengatakan meskipun terjadi penambahan kasus baru, namun tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Purbalingga relatif tinggi.

Dia juga kembali menambahkan bahwa hingga saat ini pihaknya masih terus berupaya menekan jumlah kasus COVID-19 di wilayah setempat dengan menggencarkan tes dan meningkatkan kampanye protokol kesehatan.

Dia mengatakan penambahan kasus COVID-19 di wilayah setempat harus menjadi perhatian seluruh masyarakat. "Kami terus berupaya menekan pertambahan kasus COVID-19 dengan menggencarkan program 3T. Kendati demikian penerapan program 3T juga perlu didukung dengan penerapan 3M di tengah masyarakat, yaitu dengan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan," katanya. **(ANTARA)**

Hotel-Restoran DIY Diminta Perketat Protokol Kesehatan Sambut Liburan

YOGYAKARTA - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta pengelola perhotelan dan restoran di daerah ini lebih memperketat penerapan protokol kesehatan menyambut masa libur Hari Natal dan Tahun Baru.

"Intinya kami betul-betul akan mendisiplinkan dan lebih memperketat protokol kesehatan di hotel maupun restoran jelang liburan ini," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana di Yogyakarta, Senin (29/11).

ANTARA FOTO/Andreas Fitri Atmoko/pras

Sejumlah hotel di Yogyakarta telah menyiapkan fasilitas dengan protokol kesehatan COVID-19 sebagai salah satu bentuk kesiapan menyambut tatanan normal baru.

Deddy mengatakan saat hari libur Natal dan Tahun Baru pengelola hotel diminta menyeleksi kegiatan MICE. Kegiatan yang mengundang kerumunan orang seperti konser musik, dan acara sejenis diminta dihindari. "Gala dinner boleh tetapi terbatas, harus tetap menerapkan protokol kesehatan, artinya membatasi jumlah orang sesuai luas ruangannya, jaga jarak, dan tidak boleh berjoged-joged di acara itu," kata dia.

Deddy mengatakan berdasarkan hasil evaluasi di internal anggota PHRI, terdapat beberapa prosedur standar operasi (SOP) hotel-restoran yang masih dilanggar. Menurutnya, masih ada sebagian hotel yang tidak melaksanakan pengecekan suhu tubuh tamu atau pengunjung. "Beberapa hotel membiarkan tamu masuk hotel tanpa cek suhu dulu. Walaupun alatnya ada, tetapi petugas pengecekan suhunya tidak ada, masak tamu diminta cek suhu sendiri," kata dia.

Selain itu, menurut dia, ada pula beberapa hotel yang membiarkan tamu berkerumun di loby hotel saat turun dari mobil/bus. Berdasarkan aturan, tamu yang turun dari bus dibagi setiap kelompok terdiri lima orang secara bergantian. "Sedangkan pelanggaran dari pihak tamu, didominasi pelanggaran pemakaian masker," kata dia.

Meski tamu telah menyerahkan hasil tes cepat nonreaktif atau negatif, menurut Deddy, mereka tetap harus diminta disiplin menerapkan protokol kesehatan. **(ANTARA)**

Pilkada 2020 Sukses: Pemilih Sehat, Pemilih Cerdas, dan Pemilih Damai

Oleh Widodo Muktiyo

JAKARTA - Sepanjang sejarahnya, Indonesia telah tiga kali menggelar pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, yakni pada 9 Desember 2015, 15 Februari 2017 dan 27 Juni 2018.

Berbeda dengan tiga pilkada serentak sebelumnya, pada Pilkada 9 Desember 2020 pemerintah mengusung tiga tagline atau ëbrandingí sekaligus. Tiga tema itu yakni mewujudkan 'Pemilih Sehat', 'Pemilih Cerdas', dan 'Pemilih Damai'.

Mengajak masyarakat menjadi 'Pemilih Cerdas' dan 'Pemilih Damai' senantiasa digaungkan dalam setiap pemilihan umum, karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika terus melakukan literasi demi menghindari kencangnya berita bohong atau hoaks, provokasi dan ujaran kebencian yang dapat memecah belah kesatuan.

ANTARA/HO/Dukumen Pribadi

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Prof Dr Widodo Muktiyo.

Agenda demokrasi penting, tapi yang jauh lebih penting daripada itu adalah menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa. Selain meminta masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial, melakukan filterisasi berita yang diterima dengan prinsip 'saring sebelum sharing', Kementerian Kominfo juga menggandeng pemilik platform media sosial di Indonesia yang dianggap memiliki peran penting untuk mencegah hoaks menjelang Pemilihan Serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.

Kementerian Kominfo berkolaborasi dengan pengelola platform Instagram, Facebook, Twitter, dan Telegram untuk turut serta mengendalikan konten negatif atau berita hoaks seputar Pemilihan Serentak 2020. Pada sisi pemilik platform kita adakan suatu pemahaman yang sama, kemudian dari sisi user atau masyarakat juga mempunyai kesadaran literasi yang baik. Kolaborasi inilah yang menjadi salah satu pilar penting untuk bisa menjadikan Pemilihan Serentak 2020 menjadi lebih baik.

Terkait situasi khusus karena pada tahun ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah menambahkan satu ajakan lagi, yakni mewujudkan 'Pemilih Sehat'. Pemerintah sangat serius mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada Serentak 2020 agar tidak menjadi klaster baru penyebaran COVID-19.

Pada 8 September 2020 lalu di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan topik Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak. Pada ratas itu, Presiden Jokowi menekankan penyelenggaraan pilkada harus dilakukan dengan norma baru, dengan cara baru. Presiden Jokowi meminta kepada semua pihak, kepada penyelenggara Pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat pemerintah, jajaran keamanan dan penegak hukum, kepada seluruh aparat TNI dan Polri, seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi, untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam mengikuti protokol kesehatan.

Menegaskan hal itu, kesimpulan rapat kerja dan rapat dengar pendapat antara Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat republik Indonesia (DPR RI) dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI dan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) di Gedung Parlemen Senayan pada 21 September 2020, menyepakati pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada tanggal 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

Dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, Komisi II DPR RI melalui ketuanya Ahmad Doli Kurnia Tandjung meminta KPU RI untuk segera merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Dalam Kondisi Bencana Non-alam.

Keputusan Presiden Jokowi yang dikuatkan dengan DPR serta penyelenggara pemilu tetap menggelar pemilihan serentak pada tahun ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak boleh kalah dengan pandemi.

Singapura, Korea Selatan, dan juga Amerika Serikat tetap menyelenggarakan pemilu di masa pandemi. Tentu dengan protokol kesehatan sangat ketat. Ini menunjukkan bahwa kehidupan harus terus berjalan. Kita tak boleh menyerah melawan virus corona.

Pemilihan serentak tetap dilaksanakan untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih terpenuhi. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengatur mengenai hak memilih seperti tercantum dalam dalam Pasal 43 yang menyatakan "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Poin penting lain mengapa Pilkada Serentak tetap dilaksanakan tahun ini karena tidak ada pihak manapun yang bisa memberi kepastian kapan COVID-19 akan berakhir.

Pelajaran dari tiga negara tadi setidaknya memberikan kita inspirasi, bahwa agenda demokrasi bisa tetap dijalankan di masa pandemi asalkan diiringi protokol kesehatan sangat ketat.

Amerika Serikat memutuskan tidak menunda pemilihan umumnya, meskipun saat ini masih berada di puncak daftar negara terdampak COVID-19 dengan jumlah kasus lebih dari 12 juta orang dan korban meninggal dunia lebih dari 250 ribu orang.

Akhirnya, marilah kita sukseskan hajatan demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 yang akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota di Indonesia.

Pemilihan Serentak 2020 Sukses, Pemilih Sehat, Pemilih Cerdas, dan Pemilih Damai! **(ANTARA)**

**)Widodo Muktiyo, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika.*